



**PEMERINTAH
KOTA KOTAMOBAGU**

**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

**RENCANA
STRATEGIS
(RENSTRA)**

2025-2029



+62 812-4293-2303



www.disdukcapil.kotamobagu.go.id



Jl. Paloko Kinalang, Kel.
Kotobangon, Kec. Kotamobagu
Timur

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu Tahun 2025-2029 dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu pada dasarnya merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dan Keputusan yang diambil dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif , mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan Keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis yang matang diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menunjang urusan pemerintahan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, khususnya dilingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Demikian Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun perencanaan, sekaligus sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan, sehingga masukan dan saran yang konstruktif sangat

diharapkan guna penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga Rencana Strategis ini dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kinerja perangkat daerah serta pelayanan kepada masyarakat.

Kotamobagu, 28 November 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KOTA KOTAMOBAGU



ROI PAPUTUNGAN, S.E., M.A.P.
PEMBINA TKT I
NIP. 19760714 200902 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iviv
DAFTAR GRAFIK.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. PENDAHULUAN.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.3.1. Maksud	5
1.3.2. Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah.....	8
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	30
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	45
2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah	45
2.2.2. Integrasi dengan Isu KLHS.....	46
2.2.3. Isu Global, Nasional, dan Regional.....	47
2.2.4. Isu Strategis Perangkat Daerah	47
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	49
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	58
BAB V PENUTUP	105

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu.....	30
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang Menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2023.....	30
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Pangkat / Golongan Tahun 2023	31
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023	31
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu.....	32
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu tahun 2021-2024	38
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah.....	43
Tabel 2.8	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD.....	48
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	51
Tabel 3.2	Penetapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026-2030.....	54
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	55
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program /Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60
Tabel 4.2	Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan	84
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Pemerintah Kota Kotamobagu	102
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama	104
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci.....	104

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Framework.....	50
------------	----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. PENDAHULUAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD berfungsi sebagai pedoman operasional bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sekaligus memastikan adanya keterpaduan, sinkronisasi, dan konsistensi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Kepala Daerah dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025–2029, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun Renstra yang terintegrasi dengan RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah, yang juga mengacu pada RPJPD Kota Kotamobagu Tahun 2025–2045, RPJMN Tahun 2025–2029, serta RPJPN Tahun 2025–2045.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B. Oleh karena itu, penyusunan Renstra ini menjadi instrumen penting untuk mengarahkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih berkualitas, mudah diakses, transparan, dan akuntabel.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu Tahun 2025–2029 disusun dengan maksud:

1. Melakukan identifikasi menyeluruh atas kondisi, capaian kinerja, dan pelayanan administrasi kependudukan pada periode sebelumnya.

2. Merumuskan arah kebijakan, strategi, serta prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran RPJMD 2025–2029.
3. Menetapkan arah pengembangan pelayanan kependudukan yang berorientasi pada hasil (*outcome-oriented*) hingga proyeksi tahun 2030.
4. Merumuskan langkah strategis untuk menghadapi tantangan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan, termasuk standar penilaian kinerja dari Kementerian PANRB.

Dengan memperhatikan ketentuan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Renstra ini disusun menggunakan pendekatan teknokratik yang berbasis data, analisis rasional, serta mempertimbangkan dimensi tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS). Selain itu, dokumen ini dirancang untuk mendukung transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan, serta menjadi acuan dalam penyusunan dokumen tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Dengan demikian, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu Tahun 2025–2029 menjadi pedoman strategis dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu antara lain:

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

- berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
16. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota kotamobagu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2024 Nomor 200);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2025-2029. Renstra ini disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta berfungsi sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu bertujuan untuk:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan daerah ke dalam arah kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara rinci, terukur, dan dapat dilaksanakan sepanjang periode 2025–2029 dengan proyeksi hingga tahun 2030.
2. Menyusun proyeksi kebutuhan sumber daya, kelembagaan, dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas, sekaligus menjawab tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik di era digitalisasi, demokratisasi, dan keterbukaan informasi.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyusun rencana kerja tahunan yang terpadu, selaras dengan RPJMD, serta mendukung pencapaian target kinerja berbasis hasil (*outcome-oriented*).
4. Menjadi acuan evaluasi bagi pimpinan dan seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menilai kesesuaian arah kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan dengan sasaran strategis yang ditetapkan dalam periode perencanaan menengah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .

- 2.1 Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Paling sedikit memuat:
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Subbab Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - 2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III paling sedikit memuat:

- 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat:

- 4.1. Uraian Program;
- 4.2. Uraian Kegiatan;

- 4.3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
- 4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan;
- 4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
- 4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu dan Peraturan Wali kota Kotamobagu Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu memiliki fungsi sebagai berikut:

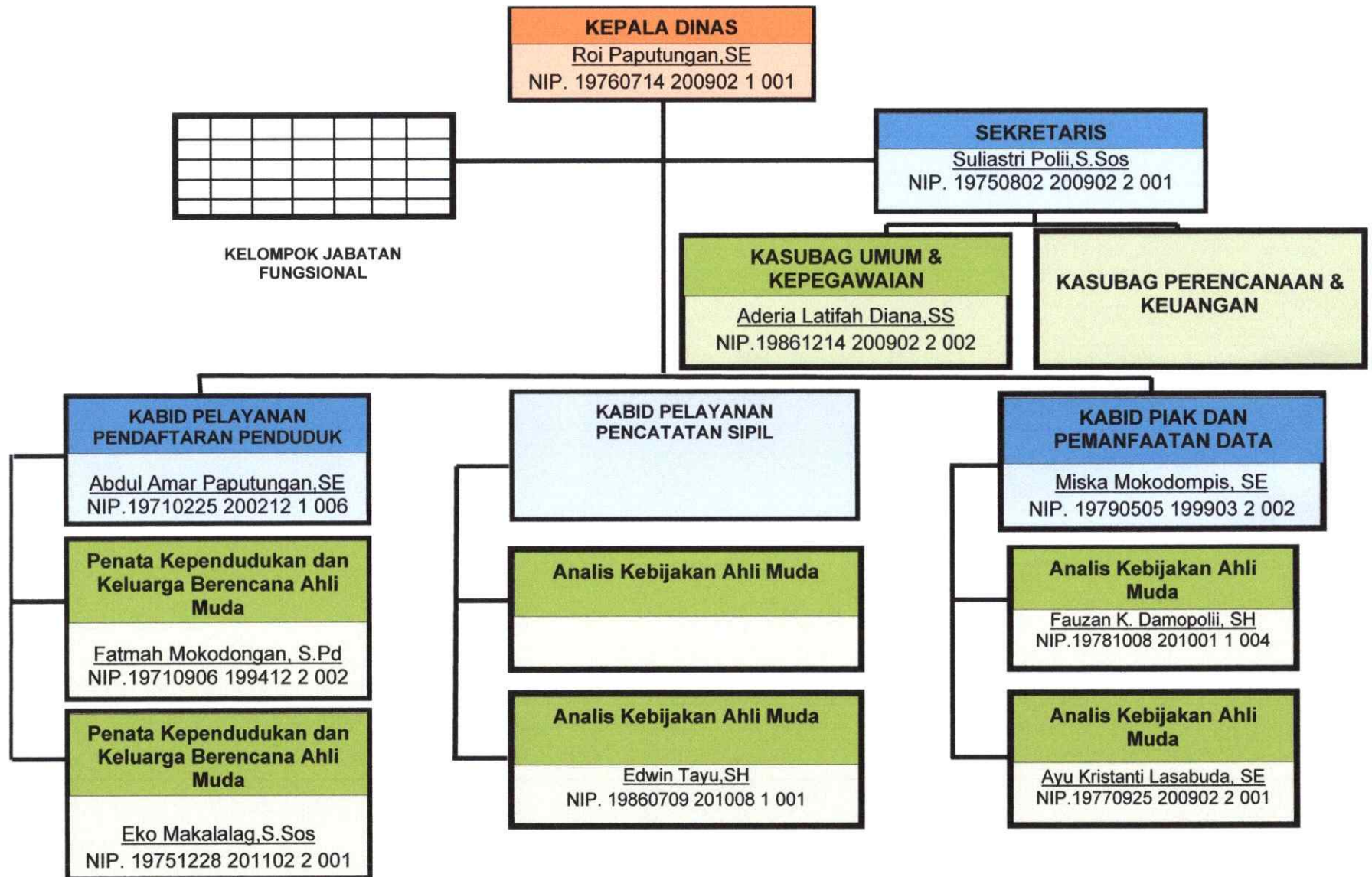
- a. **Perumusan kebijakan teknis** di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan kewenangan daerah.
- b. **Pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan** di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- c. **Pelaksanaan evaluasi, monitoring, dan pelaporan** terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai dasar perbaikan kebijakan dan peningkatan kinerja.
- d. **Pelaksanaan urusan administrasi dan tata kelola internal dinas**, termasuk pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan.

- e. **Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota** sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu disusun berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Struktur ini ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B. Susunan organisasi dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga setiap unit kerja memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Berikut struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada gambar dibawah.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia

Jumlah keseluruhan pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu adalah sebanyak 29 orang, terdiri dari 25 orang Aparatur Sipil Negara dan 4 orang Tenaga Non Aparatur Sipil Negara. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	APARATUR SIPIL NEGARA	25	84 %
2.	NON APARATUR SIPIL NEGARA	4	16 %
	JUMLAH	29	100

Sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, maka pengisian formasi jabatan struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari eselon II, III, dan IV yaitu sebanyak 5 orang. Untuk jabatan fungsional, 1 orang belum terisi. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang Menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2025

NO	JABATAN/PELAKSANA	JUMLAH (ORANG)	%
1	Eselon II	1	3,45
2	Eselon III	3	10,34
3	Eselon IV	1	3,45
4	Fungsional Tertentu	5	17,24
5	Staf Aparatur Sipil Negara	15	51,72
6	Staf Non Aparatur Sipil Negara	4	13,79
	JUMLAH	29	100

Dari 25 jumlah pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat pegawai yang berstatus Golongan IV sebanyak 4 orang, Golongan III

sebanyak 15 orang sedangkan Golongan II sebanyak 6 orang. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Pangkat / Golongan Tahun 2025

NO	JABATAN/STAF	JUMLAH (ORANG)	%
1	Golongan IV	4	16 %
2	Golongan III	15	60 %
3	Golongan II	6	24 %
4	Golongan I	-	-
	JUMLAH	25	100

Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

NO	JABATAN/STAF	JUMLAH (ORANG)	%
1	Strata-3 (S3)	-	-
2	Strata-2 (S2)	1	4 %
3	Strata-1 (S1)	16	64 %
4	Sarjana Muda/ D3	1	4 %
5	SLTA/SMK	7	28 %
6	SLTP	-	-
7	SD	-	-
	JUMLAH	25	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa potensi sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih didominasi oleh sumber daya manusia dengan klasifikasi pendidikan SMA dan Sarjana. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan lembaga.

Sebagaimana Gambaran diatas maka dapat digambarkan bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara terdiri dari 25 Orang, dimana yang 5 Orang adalah Pejabat Struktural, 5

orang sebagai Jabatan Fungsional Tertentu dan Pelaksana Sebanyak 15 Orang sehingga dari sisi Analisis Jabatan masih terdapat kekurangan Aparatur Sipil Negara dengan asumsi setiap jabatan eselon III membawahi 6 Orang Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan fasilitas kerja yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu tergolong kurang memadai ini bisa terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu

No	Uraian	Jumlah (unit/buah/set)	KONDISI		
			B	RR	RB
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	2	√		
2	Sepeda Motor	11	√		
3	Lemari Penyimpanan	4	√		
4	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1			√
5	Mesin Ketik Elektronik	1	√		
6	Mesin Absen (Time Recorder)	1	√		
7	Lemari Besi	14	√		
8	Rak Kayu	1			√
9	Filling Besi/Metal	9	√		
10	Band Kas	1	√		
11	Lemari Kaca	1	√		
12	Papan Nama Instansi	1	√		
13	Alat Pemotong Kertas	3	√		
14	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	11	√		
15	Lemari Kayu	1	√		
16	Rak Kayu	1	√		

No	Uraian	Jumlah (unit/buah/set)	KONDISI		
			B	RR	RB
	Rak Kayu	1			√
17	Kursi Besi/Metal	7	√		
18	Meja Rapat	1	√		
19	Meja Reseption	8	√		
20	Kursi Rapat	10	√		
21	Kursi Rapat	9			√
22	Kursi Tamu	20	√		
23	Kursi Putar	20	√		
24	Kursi Lipat	2	√		
25	Kursi Lipat	10			√
26	Meja Komputer	7	√		
27	Meja Komputer	5			√
28	Meja Biro	6	√		
29	Sofa	2	√		
30	Jam Mekanis	8	√		
31	Mesin Potong Rumput		√		
32	Lemari Es	1	√		
33	AC Unit	12	√		
34	Kipas Angin	3	√		
35	Kipas Angin	1			√
36	Televisi	7	√		
37	Wireless	2	√		
38	Camera Video	13	√		
39	Camera Film	3	√		
40	Dispenser	3	√		
41	Dispenser	2			√
42	Handy Cam	1	√		
43	Alat Rumah Tangga Lain-lain	72	√		
44	Mainframe	4	√		
45	P.C Unit	8			√

No	Uraian	Jumlah (unit/buah/set)	KONDISI		
			B	RR	RB
46	P.C Unit	17	√		
47	Lap Top	13	√		
48	Lap Top	1			√
49	Note Book	1			√
50	Personal Komputer Lain-lain	1			√
51	Card Reader	3	√		
52	Hard Disk	1	√		
53	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	3	√		
54	Printer	24	√		
55	Printer	5		√	
56	Printer	11			√
57	Scanner	9	√		
58	Scanner	2			√
59	External	2	√		
60	External	1			√
61	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	7	√		
62	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	3			√
63	Hub	1	√		
64	Modem	12	√		
65	Peralatan Jaringan Lain-lain	8	√		
66	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1			√
67	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	√		
68	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	√		
69	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1			√
70	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	√		

No	Uraian	Jumlah (unit/buah/set)	KONDISI		
			B	RR	RB
71	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7			√
72	Meja Kerja Pejabat Eselon V	1	√		
73	Meja Kerja Pejabat Eselon V	5			√
74	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5	√		
75	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1			√
76	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	√		
77	Kursi Kerja Pejabat Eselon III			√	
78	Kursi Kerja Pejabat Eselon III			√	

Keterangan : B = Baik, RR = Rusak Ringan, RB = Rusak Berat

Seluruh sarana dan prasarana yang ada, merupakan aset yang statusnya sudah tercatat didalam Buku Aset sebagai barang milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun sebagian peralatan untuk Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah milik Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipinjam pakaikan mulai Tahun 2011. Dengan demikian, sarana dan prasarana yang ada menjadi salah satu penunjang untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Administrasi Kependudukan sudah dimakan usia dan rusak ringan sehingga dapat menghambat peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan adalah Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran/target Renstra periode sebelumnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan urusan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Pada Tahun ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penduduk yang memiliki KTP				91,00	95,00	98,00	98,00	133,64	99,34	99,00	80,00	146,86%	104,57%	101,02%	81,63%
2	Persentase Anak yang Memiliki Akta Lahir				91,00	95,00	98,00	100,00	100,00	97,85	100,00	90,00	109,89%	103,00%	102,04%	90,00%
3	Persentase Jumlah Dokumen Data Kependudukan				91,00	95,00	98,00	12,00	91,00	100,00	100,00	80,00	100,00%	105,26%	102,04%	666,67%
4	Presentase Kepemilikan Buku Profil Kependudukan dan Buku Data Penduduk				91,00	95,00	98,00		91,00	97,85	100,00		100,00%	103,00%	102,04%	0,00%
5	Persentase Anak Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)							78,00				65,00				83,33%
6	Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga (KK)							100,00				90,00				90,00%
7	Pesentase Penduduk yang pindah datang (%)							100,00				65,00				65,00%
8	Pesentase Penduduk yang Memiliki Akta Kematian							100,00				98,00				98,00%
9	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Nikah							100,00				98,00				98,00%
10	Persentase Penduduk Berakta Perceraian							100,00				98,00				98,00%
11	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan							100,00				80,00				80,00%

Sedangkan besaran anggaran dan realisasi pendanaan yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah

No	Uraian	Anggaran Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.642.571.065,00	3.769.334.165,00	3.945.368.177,00	3.906.197.571,00	3.385.727.607,00	3.738.675.211,00	3.883.281.990,00	3.855.974.079,00		92,95%	99,19%	98,43%	98,71%	2,36%	4,43%

Data diatas menunjukkan bahwa alokasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil cenderung meningkat dari tahun 2021 hingga 2023 dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 2,36%, meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan dari Rp. 3,945 miliar menjadi Rp. 3,906 miliar. Realisasi anggaran juga mengalami tren positif dengan rata-rata pertumbuhan lebih tinggi, yakni 4,43% per tahun. Tingkat serapan anggaran relatif baik dan stabil dengan rasio realisasi terhadap anggaran berada di atas 92%, bahkan mencapai hampir 99% pada tahun 2022–2024.

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Disdukcapil cukup efektif, di mana realisasi anggaran mampu mendekati total alokasi setiap tahunnya. Penurunan anggaran pada tahun 2024 tidak diikuti penurunan signifikan dalam realisasi, yang justru tetap terjaga pada level 98,71%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan pendanaan Disdukcapil relatif efisien, dengan tingkat serapan anggaran tinggi dan konsisten, meskipun alokasi anggaran tidak mengalami peningkatan yang besar setiap tahunnya.

Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan. Oleh karena itu, kelompok sasaran pelayanan yang menjadi penerima manfaat langsung maupun tidak langsung dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Seluruh Penduduk Kota Kotamobagu

Sebagai penerima layanan utama administrasi kependudukan, meliputi penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), serta berbagai dokumen pencatatan sipil lainnya.

2. Anak Usia 0–17 Tahun

Sebagai sasaran layanan penerbitan akta kelahiran dan KIA yang menjadi dasar pemenuhan hak atas identitas hukum serta akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

3. Pasangan dan Keluarga

Meliputi pasangan yang menikah, bercerai, maupun keluarga yang membutuhkan dokumen kependudukan terkait peristiwa penting, seperti akta perkawinan, akta perceraian, serta perubahan data keluarga.

4. Kelompok Rentan

Termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, penduduk miskin, dan kelompok marginal lainnya yang membutuhkan kemudahan layanan melalui inovasi jemput bola, mobile service, dan *pelayanan berbasis inklusi sosial*.

5. Penduduk Pindah Datang dan Pindah Keluar

Sebagai sasaran layanan mutasi kependudukan yang berimplikasi pada akurasi data agregat kependudukan serta pemutakhiran basis data nasional.

6. Lembaga dan Instansi Pemerintah maupun Swasta

Sebagai pengguna data kependudukan untuk mendukung perencanaan pembangunan, penyelenggaraan pelayanan publik, validasi penerima bantuan sosial, pelaksanaan pemilu/pilkada, serta layanan di sektor perbankan, pendidikan, dan kesehatan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, data potensi daerah, serta dinamika pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu masih menghadapi sejumlah permasalahan yang berimplikasi pada kualitas pelayanan publik. Permasalahan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Pelayanan yang diberikan masih kurang inovatif**, dengan kecenderungan prosedur manual sehingga aksesibilitas dan kemudahan masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan belum optimal.

2. **Kompetensi sumber daya manusia belum merata**, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi, komunikasi pelayanan publik, serta manajemen perubahan, sehingga kinerja layanan belum sepenuhnya responsif.
3. **Masih ditemui data ganda dan anomali**, akibat validasi yang belum optimal dan ketidaksinkronan dengan database nasional, sehingga memengaruhi integritas data kependudukan.
4. **Kesadaran dan pemahaman masyarakat masih rendah**, khususnya terkait kepemilikan dokumen kependudukan seperti Kartu Identitas Anak (KIA), akta kematian, dan pelaporan peristiwa pindah datang.
5. **Sarana, prasarana, dan infrastruktur pelayanan belum memadai**, terutama di wilayah pinggiran, sehingga membatasi jangkauan layanan yang inklusif.
6. **Perlindungan data dan keamanan sistem digital masih lemah**, seiring dengan transformasi menuju Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang menuntut standar keamanan siber lebih ketat.
7. **Komunikasi kebijakan dan sosialisasi belum efektif**, sehingga banyak masyarakat yang belum memahami kewajiban dan manfaat layanan administrasi kependudukan.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi tantangan dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang efektif, inklusif, dan berbasis teknologi.

2.2.2. Integrasi dengan Isu KLHS

Dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Kotamobagu, telah diidentifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam penyusunan Renstra PD, antara lain:

- a) Alih fungsi lahan;
- b) Ketimpangan ekonomi;
- c) Persampahan;
- d) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan; dan
- e) Kemiskinan.

Isu-isu tersebut berhubungan erat dengan pelayanan administrasi kependudukan. Misalnya, ketimpangan ekonomi dan kemiskinan berdampak pada rendahnya akses

masyarakat terhadap dokumen kependudukan; persoalan tata kelola memengaruhi integrasi data; dan isu persampahan dapat direspons dengan kebijakan digitalisasi pelayanan yang ramah lingkungan (*paperless*).

2.2.3. Isu Global, Nasional, dan Regional

Selain KLHS, terdapat pula isu global, nasional, dan regional yang menjadi acuan bagi Disdukcapil Kota Kotamobagu, yaitu:

- a) **Global:** Target *Universal Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) 2030* yang menuntut cakupan akta kelahiran dan akta kematian 100%.
- b) **Nasional:** Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Satu Data Indonesia, serta UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- c) **Regional (Sulawesi Utara):** Kebutuhan sinergi data kependudukan untuk mendukung sektor kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, serta penyelenggaraan pemilu/pilkada serentak.

2.2.4. Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan potensi daerah, permasalahan internal, isu KLHS, serta isu global/nasional/regional, dapat disimpulkan isu strategis yang harus dijawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu pada periode 2025-2029, yaitu:

- 1. Percepatan transformasi digital layanan administrasi kependudukan berbasis IKD.
- 2. Penguatan validitas, integritas, dan integrasi data kependudukan.
- 3. Perluasan cakupan layanan kependudukan dasar (KIA, akta kematian, pindah datang).
- 4. Peningkatan kapasitas SDM dan kualitas pelayanan publik yang inklusif.
- 5. Penyediaan sarana, prasarana, dan infrastruktur digital yang memadai.
- 6. Perlindungan data pribadi dan keamanan sistem kependudukan digital.
- 7. Penguatan komunikasi publik dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan.

Tabel 2.8 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah	Permasalahan PD	Isu KLHS	Isu Global/Nasional/Regional	Isu Strategis 2025–2029
Jumlah penduduk 121.189 jiwa, tren bonus demografi	Layanan kurang inovatif, dominan manual	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Nasional: SPBE, digitalisasi pelayanan publik, IKD	Percepatan transformasi digital layanan adminduk berbasis IKD
Tingkat kepemilikan KTP, KK, akta kelahiran relatif tinggi (>90%)	Data ganda, anomali, tidak sinkron pusat-daerah	Tata kelola pemerintahan & integritas data	Nasional: Satu Data Indonesia, UU Perlindungan Data Pribadi	Penguatan validitas, integritas, dan integrasi data kependudukan
Cakupan KIA, akta kematian, pindah datang masih rendah	Rendahnya kesadaran masyarakat	Kemiskinan & ketimpangan ekonomi	Global: <i>Universal CRVS</i> 2030 (akta lahir/kematian 100%)	Perluasan cakupan layanan kependudukan dasar (KIA, akta kematian, pindah datang)
SDM aparatur tersedia, tapi kompetensi belum merata	Kompetensi SDM terbatas (IT & pelayanan)	Tata kelola pemerintahan	Regional: sinergi data untuk pendidikan, kesehatan, bansos	Peningkatan kapasitas SDM dan kualitas pelayanan publik
Infrastruktur layanan tersedia, tapi tidak merata	Sarana & jaringan internet terbatas	Persampahan (<i>paperless</i> digitalisasi)	Nasional: akselerasi digitalisasi layanan publik	Penyediaan sarana prasarana dan infrastruktur digital yang memadai
Pemanfaatan awal Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Kekhawatiran keamanan data & perlindungan privasi	Tata kelola pemerintahan	Nasional: Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, keamanan siber	Perlindungan data pribadi dan keamanan sistem kependudukan digital
Dukungan lintas sektor: kesehatan, pendidikan, bansos, pemilu	Sosialisasi kebijakan belum efektif	Kemiskinan & kesadaran publik	Nasional: literasi digital & partisipasi publik	Penguatan komunikasi publik & kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen adminduk

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, dan efisien sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Kotamobagu, maka perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah menjadi instrumen penting dalam mengukur kinerja sekaligus memberikan arah pembangunan sektor administrasi kependudukan.

3.1. Tujuan dan Sasaran

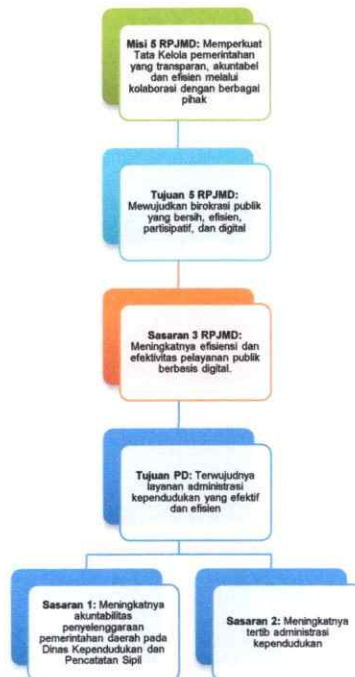
Berdasarkan hasil identifikasi sasaran RPJMD yang relevan adalah **Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan publik berbasis digital**, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan tujuan dan sasaran sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Tujuan: *Terwujudnya layanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien.* Tujuan ini diarahkan untuk mendukung peningkatan efisiensi serta efektivitas pelayanan publik berbasis digital, sejalan dengan tuntutan transformasi birokrasi dan perkembangan teknologi informasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran yang ditetapkan berfokus pada:

1. **Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**, yang diukur melalui peningkatan nilai SAKIP perangkat daerah.
2. **Meningkatnya tertib administrasi kependudukan**, yang diukur melalui peningkatan indeks tertib kepemilikan administrasi kependudukan dan tertib pemanfaatan data.

Pemahaman terhadap keterkaitan antara misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Kotamobagu dengan Tujuan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dibawah ini pada desain *logical framework* berikut:

Grafik 3.1 Framework



Untuk mengukur ketercapaian tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkan indikator kinerja serta target capaian tahunan hingga tahun 2030. Indikator-indikator ini menjadi acuan dalam memantau konsistensi peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan, akuntabilitas kinerja perangkat daerah, serta ketertiban administrasi dan pemanfaatan data kependudukan. Adapun rincian tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025-2029 Kota Kotamobagu

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
Meningkatnya fisiensi dan efektivitas pelayanan publik berbasis digital	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)	0,00	89,95	89,96	89,97	89,98	89,99	90,00	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	69,96	70	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	
		Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan	Indeks Tertib Kepemilikan Administrasi Kependudukan dan Tertib Pemanfaatan Data (%)	0,00	92,55	92,56	92,57	92,58	92,59	92,60	

3.2. Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029

Strategi pembangunan perangkat daerah disusun sebagai upaya sistematis untuk menjawab isu-isu strategis serta mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025–2029. Strategi ini berfungsi sebagai kerangka tindakan yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya, baik manusia, kelembagaan, maupun infrastruktur pelayanan publik.

Dalam konteks Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, strategi pembangunan diarahkan pada akselerasi transformasi digital, penguatan tata kelola administrasi kependudukan, serta peningkatan kualitas layanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Penyusunan strategi ini juga mempertimbangkan dinamika lingkungan eksternal, perkembangan kebijakan nasional, serta tuntutan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, akurat, transparan, dan aman.

Oleh karena itu, strategi yang dirumuskan tidak hanya berorientasi pada pencapaian indikator kinerja, tetapi juga difokuskan untuk memperkuat integritas data kependudukan, memperluas cakupan layanan dasar, meningkatkan kapasitas aparatur, serta memastikan tersedianya sarana dan prasarana digital yang memadai. Dengan demikian, strategi ini diharapkan mampu menjadi landasan operasional dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara efektif dan efisien.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka menengah, isu-isu strategis, serta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu Tahun 2025-2029 disusun dan dikelompokkan berdasarkan masing-masing sasaran. Strategi ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terfokus, terukur, serta selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Strategi berdasarkan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

Strategi Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Penguatan sistem perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja berbasis e-SAKIP.
2. Optimalisasi pemanfaatan satu data kependudukan untuk mendukung kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).
3. Peningkatan transparansi layanan melalui publikasi kinerja dan keterbukaan informasi publik.
4. Penguatan tata kelola internal melalui penerapan manajemen risiko dan pengawasan melekat.

Strategi Sasaran 2: Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan

1. Akselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam layanan administrasi kependudukan.
2. Pengembangan layanan digital publik yang terintegrasi, inklusif, dan ramah pengguna.
3. Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan pelayanan prima dan penguasaan teknologi informasi.
4. Optimalisasi layanan jemput bola (*mobile service*) untuk menjangkau Masyarakat.
5. Percepatan kepemilikan dokumen kependudukan melalui inovasi layanan berbasis teknologi
6. Integrasi data kependudukan dengan lintas sektor (pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, keuangan).
7. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan melalui kampanye edukasi publik.
8. Pemanfaatan Data kependudukan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.

3.3. Penahapan Pembangunan

Penahapan pembangunan merupakan langkah prioritas tahunan yang disusun secara bertahap untuk memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Penahapan ini mencerminkan proses berkelanjutan mulai dari penguatan pondasi layanan, pengembangan sistem, perluasan cakupan, hingga konsolidasi akhir untuk memastikan keberlanjutan pelayanan administrasi kependudukan yang efektif,

efisien, dan berbasis digital. Adapun penahapan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026-2030

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Konsolidasi SPBE, peningkatan SDM, dan perluasan layanan jemput bola.	Pengembangan layanan digital, peningkatan sarana prasarana, dan perluasan kepemilikan dokumen dasar (KIA, Akta, KTP-el).	Optimalisasi Satu Data, integrasi lintas sektor, dan perlindungan data pribadi.	Penguatan akuntabilitas melalui e-SAKIP, pemanfaatan big data, dan komunikasi publik.	Konsolidasi layanan digital IKD, pencapaian target Renstra, dan pemantapan perlindungan data.

3.4. Penahapan Pembangunan

Arah kebijakan perangkat daerah merupakan pedoman operasional yang disusun untuk memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Perumusan arah kebijakan ini berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) urusan administrasi kependudukan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Kotamobagu. Dengan demikian, arah kebijakan yang ditetapkan tidak hanya menjawab isu strategis, tetapi juga memastikan keselarasan antara kebijakan nasional, kebijakan daerah, dan kebutuhan masyarakat. Adapun arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Operasionalisasi NSPK	Dasar Hukum NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
1	Penyelenggaraan pelayanan adminduk yang efektif, efisien, dan non-diskriminatif	UU 24/2013 tentang Adminduk	Melaksanakan transformasi digital pelayanan publik dengan pendekatan Satu Data Kotamobagu	Akselerasi transformasi digital layanan adminduk melalui SPBE dan pemanfaatan Satu Data Kependudukan	Selaras dengan program Satu Data Indonesia
2	Digitalisasi layanan administrasi kependudukan	Permendagri 95/2019 tentang SIAK; Permendagri 72/2022 tentang IKD	Digitalisasi layanan administrasi kependudukan, perizinan, dan pajak daerah	Pengembangan layanan kependudukan digital terintegrasi dan inklusif berbasis Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Mendukung target nasional IKD
3	Penerapan reformasi birokrasi dan pelayanan publik	PermenPANRB 90/2021 tentang Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Peningkatan integritas layanan adminduk melalui pembangunan Zona Integritas	Mendukung Reformasi Birokrasi Tematik
4	Penguatan kapasitas SDM aparatur kependudukan	UU 23/2014; PermenPANRB 38/2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN	Meningkatkan kapasitas ASN melalui pelatihan kepemimpinan digital dan manajemen berbasis bukti	Peningkatan kompetensi ASN Disdukcapil melalui pelatihan SPBE, pelayanan prima, dan manajemen berbasis data	Mendukung penguatan kapasitas birokrasi
5	Perluasan cakupan kepemilikan dokumen dasar (KIA, akta, KTP-el)	Pasal 79A UU 24/2013; Permendagri 95/2019	Mengembangkan kemitraan pelayanan publik dengan swasta, komunitas, dan masyarakat	Percepatan kepemilikan dokumen dasar melalui kemitraan dengan desa/kelurahan, sekolah, dan komunitas	Mendukung Universal Civil Registration

No	Operasionalisasi NSPK	Dasar Hukum NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
6	Peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi	UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatkan keterbukaan informasi publik sebagai wujud birokrasi bersahabat	Penguatan keterbukaan informasi layanan adminduk melalui media digital, website, dan PPID	Mendukung implementasi PPID daerah
7	Perlindungan data pribadi kependudukan	UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; Permendagri 95/2019	Mewujudkan birokrasi adaptif dan partisipatif dengan inovasi pelayanan berbasis komunitas	Penguatan keamanan sistem kependudukan digital dan inovasi pelayanan berbasis komunitas yang inklusif	Mendukung perlindungan hak privasi penduduk

Dengan demikian, arah kebijakan yang telah dirumuskan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu. Arah kebijakan ini sekaligus memastikan adanya keselarasan antara norma dan standar nasional, prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD, serta kebutuhan masyarakat akan layanan administrasi kependudukan yang lebih modern, transparan, dan berintegritas.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, kegiatan, dan subkegiatan merupakan instrumen operasional perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029. Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dilakukan secara sistematis melalui mekanisme *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, hingga *output*, sehingga keterkaitan antara perencanaan dan pelaksanaan dapat terukur, terarah, dan berkesinambungan.

Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta pemutakhiran melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan landasan tersebut, konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dapat lebih terjamin.

Dengan demikian, arah kebijakan, strategi, dan isu strategis yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya diturunkan ke dalam program dan kegiatan yang lebih operasional serta dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Selain itu, daftar program, kegiatan, dan subkegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah tidak hanya berlaku pada periode 2025-2029, tetapi juga diarahkan untuk menjamin kesinambungan pembangunan hingga tahun 2030. Hal ini dimaksudkan agar Renstra Perangkat Daerah menjadi pijakan yang konsisten dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahunan sekaligus memastikan keterjagaan pencapaian kinerja perangkat daerah.

Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan strategis dengan pelaksanaan operasional, program, kegiatan, dan subkegiatan disusun secara terstruktur berdasarkan keterkaitannya dengan sasaran RPJMD yang relevan. Setiap program diarahkan untuk menghasilkan *outcome* yang mendukung pencapaian sasaran,

sementara kegiatan dan subkegiatan ditujukan untuk menghasilkan *output* yang terukur sesuai indikator kinerja.

Dengan pendekatan tersebut, penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah tidak hanya mencerminkan kerangka kerja jangka menengah, tetapi juga memastikan kesinambungan antara dokumen Renstra PD, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun rincian program, kegiatan, subkegiatan, *outcome*, *output*, indikator, serta keterkaitannya dengan Sasaran RPJMD disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program /Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan publik berbasis digital	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan ()		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)		
			Meningkatnya ketepatan penyusunan perencanaan dan evaluasi perangkat daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah (%)	2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya ketepatan penyusunan perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.12.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
		Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.12.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.12.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.12.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan			Indeks Tertib Kepemilikan Administrasi Kependudukan dan Tertib Pemanfaatan Data (%)		
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk		Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang)	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang)	2.12.02.2.01.0003 - Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	2.12.02.2.01.0005 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
				Terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	2.12.02.2.02.0002 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03.0005 - Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.04.0001 - Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	
		Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil			Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	2.12.03.2.02.0002 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02.0004 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02.0006 - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02.0008 - Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan		Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan)	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan)	2.12.04.2.01.0003 - Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	
				Terlaksananya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun (Dokumen)	2.12.04.2.02 - Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun (Dokumen)	2.12.04.2.02.0001 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi (Dokumen)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri (Dokumen)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03.0001 - Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri (Dokumen)	2.12.04.2.03.0002 - Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03.0003 - Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi (Dokumen)	2.12.04.2.03.0006 - Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)	2.12.04.2.03.0007 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	2.12.04.2.03.0008 - Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.04.0001 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.04.0002 - Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	
			Meningkatnya kualitas profil Pengelolaan kependudukan		Cakupan Pengelolaan Profil Kependuduka (Persentase)	2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan	
					Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.12.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	

Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah yang disusun dalam Renstra PD dilengkapi dengan alokasi pendanaan indikatif. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebutuhan sumber daya yang diperlukan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Pendanaan program dan kegiatan dirancang secara realistis dan proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, prioritas pembangunan, serta arah kebijakan nasional dan daerah. Penyusunan rencana pendanaan juga memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan, sehingga setiap rupiah anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya layanan administrasi kependudukan.

Dengan demikian, tabel rencana program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan berikut ini menjadi instrumen penting dalam memastikan keterpaduan antara kebijakan strategis dengan implementasi teknis, sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan penganggaran tahunan.

Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.357.931.190,00		5.361.415.540,00		5.508.103.040,00		5.553.277.640,00		5.716.605.640,00		
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.459.128.500,00		4.546.128.500,00		4.636.128.500,00		4.728.128.500,00		4.823.128.500,00		
Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	85,00	85,00	4.444.128.500,00	85,00	4.531.128.500,00	85,00	4.621.128.500,00	85,00	4.713.128.500,00	85,00	4.808.128.500,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.506.794.729,00		3.594.464.597,00		3.684.326.212,00		3.776.434.867,00		3.870.845.739,00		
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3,00	3,00	3.506.794.729,00	39,00	3.594.464.597,00	39,00	3.684.326.212,00	39,00	3.776.434.867,00	39,00	3.870.845.739,00		
2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.506.794.729,00		3.594.464.597,00		3.684.326.212,00		3.776.434.867,00		3.870.845.739,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3,00	3,00	3.506.794.729,00	39,00	3.594.464.597,00	39,00	3.684.326.212,00	39,00	3.776.434.867,00	39,00	3.870.845.739,00		
2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10.697.500,00		10.697.500,00		10.697.500,00		10.697.500,00		10.697.500,00		
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	1,00	10.697.500,00	1,00	10.697.500,00	1,00	10.697.500,00	1,00	10.697.500,00	1,00	10.697.500,00		
2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				10.697.500,00		10.697.500,00		10.697.500,00		10.697.500,00		10.697.500,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	1,00	10.697.500,00	1,00	10.697.500,00	1,00	10.697.500,00	1,00	10.697.500,00	1,00	10.697.500,00		
2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				331.472.271,00		330.802.403,00		330.940.788,00		330.832.133,00		331.421.261,00		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	3,00	4,00	331.472.271,00	4,00	330.802.403,00	4,00	330.940.788,00	4,00	330.832.133,00	4,00	331.421.261,00		

	Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)											
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	22,00	32,00		32,00		32,00		32,00		32,00	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00	
2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.658.771,00		10.988.903,00		11.127.288,00		11.018.633,00		11.607.761,00
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3,00	4,00	11.658.771,00	4,00	10.988.903,00	4,00	11.127.288,00	4,00	11.018.633,00	4,00	11.607.761,00
2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				45.902.500,00		45.902.500,00		45.902.500,00		45.902.500,00		45.902.500,00
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3,00	4,00	45.902.500,00	4,00	45.902.500,00	4,00	45.902.500,00	4,00	45.902.500,00	4,00	45.902.500,00
2.12.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				10.711.000,00		10.711.000,00		10.711.000,00		10.711.000,00		10.711.000,00
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5,00	4,00	10.711.000,00	4,00	10.711.000,00	4,00	10.711.000,00	4,00	10.711.000,00	4,00	10.711.000,00
2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	22,00	32,00	250.000.000,00	32,00	250.000.000,00	32,00	250.000.000,00	32,00	250.000.000,00	32,00	250.000.000,00
2.12.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				13.200.000,00		13.200.000,00		13.200.000,00		13.200.000,00		13.200.000,00
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		4,00	13.200.000,00	4,00	13.200.000,00	4,00	13.200.000,00	4,00	13.200.000,00	4,00	13.200.000,00
2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				213.500.000,00		213.500.000,00		213.500.000,00		213.500.000,00		213.500.000,00

Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2,00	4,00	213.500.000,00	4,00	213.500.000,00	4,00	213.500.000,00	4,00	213.500.000,00	4,00	213.500.000,00
2.12.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				213.500.000,00		213.500.000,00		213.500.000,00		213.500.000,00		213.500.000,00
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2,00	4,00	213.500.000,00	4,00	213.500.000,00	4,00	213.500.000,00	4,00	213.500.000,00	4,00	213.500.000,00
2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				187.693.000,00		187.693.000,00		187.693.000,00		187.693.000,00		187.693.000,00
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00	187.693.000,00	12,00	187.693.000,00	12,00	187.693.000,00	12,00	187.693.000,00	12,00	187.693.000,00
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00	
2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				14.993.000,00		14.993.000,00		14.993.000,00		14.993.000,00		14.993.000,00
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4,00	4,00	14.993.000,00	4,00	14.993.000,00	4,00	14.993.000,00	4,00	14.993.000,00	4,00	14.993.000,00
2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				44.200.000,00		44.200.000,00		44.200.000,00		44.200.000,00		44.200.000,00
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4,00	4,00	44.200.000,00	4,00	44.200.000,00	4,00	44.200.000,00	4,00	44.200.000,00	4,00	44.200.000,00
2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				128.500.000,00		128.500.000,00		128.500.000,00		128.500.000,00		128.500.000,00
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00	128.500.000,00	12,00	128.500.000,00	12,00	128.500.000,00	12,00	128.500.000,00	12,00	128.500.000,00
2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				193.971.000,00		193.971.000,00		193.971.000,00		193.971.000,00		193.971.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1,00	1,00	193.971.000,00	1,00	193.971.000,00	1,00	193.971.000,00	1,00	193.971.000,00	1,00	193.971.000,00

	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
2.12.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				34.995.500,00		34.995.500,00		34.995.500,00		34.995.500,00		34.995.500,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1,00	1,00	34.995.500,00	1,00	34.995.500,00	1,00	34.995.500,00	1,00	34.995.500,00	1,00	34.995.500,00	
2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				42.985.500,00		42.985.500,00		42.985.500,00		42.985.500,00		42.985.500,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		1,00	42.985.500,00	1,00	42.985.500,00	1,00	42.985.500,00	1,00	42.985.500,00	1,00	42.985.500,00	
2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4,00	4,00	9.000.000,00	4,00	9.000.000,00	4,00	9.000.000,00	4,00	9.000.000,00	4,00	9.000.000,00	
2.12.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)		1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	
2.12.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi				89.000.000,00		89.000.000,00		89.000.000,00		89.000.000,00		89.000.000,00	

Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1,00	89.000.000,00	1,00	89.000.000,00	1,00	89.000.000,00	1,00	89.000.000,00	1,00	89.000.000,00	
2.12.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.990.000,00		7.990.000,00		7.990.000,00		7.990.000,00		7.990.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	2,00	7.990.000,00	2,00	7.990.000,00	2,00	7.990.000,00	2,00	7.990.000,00	2,00	7.990.000,00	
Meningkatnya ketepatan penyusunan perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah (%)	85,00	85,00	15.000.000,00	85,00	15.000.000,00	85,00	15.000.000,00	85,00	15.000.000,00	85,00	15.000.000,00	
2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2,00	2,00	15.000.000,00	2,00	15.000.000,00	3,00	15.000.000,00	2,00	15.000.000,00	2,00	15.000.000,00	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2,00	2,00	3.000.000,00	2,00	3.000.000,00	3,00	3.000.000,00	2,00	3.000.000,00	2,00	3.000.000,00	
2.12.01.2.01.0002 - Koordinasi dan				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	

Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2,00	2,00	3.000.000,00	2,00	3.000.000,00	2,00	3.000.000,00	2,00	3.000.000,00	2,00	3.000.000,00		
2.12.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2,00	2,00	3.000.000,00	2,00	3.000.000,00	2,00	3.000.000,00	2,00	3.000.000,00	2,00	3.000.000,00		
2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tertelaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4,00	4,00	3.000.000,00	4,00	3.000.000,00	4,00	3.000.000,00	4,00	3.000.000,00	4,00	3.000.000,00		
2.12.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1,00	1,00	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00		
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				361.115.140,00		361.115.140,00		361.115.140,00		361.115.140,00		361.115.140,00		
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	1,79	2,00	361.115.140,00	2,30	361.115.140,00	2,40	361.115.140,00	2,50	361.115.140,00	3,00	361.115.140,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	68,10	7,00		75,00		8,00		85,00		9,00			
2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk				248.390.140,00		248.390.140,00		248.390.140,00		248.390.140,00		248.390.140,00		
Tertelaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	0,00	2,00	248.390.140,00	2,00	248.390.140,00	2,00	248.390.140,00	2,00	248.390.140,00	2,00	248.390.140,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			

	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang)	0,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				13.600.000,00		13.600.000,00		13.600.000,00		13.600.000,00		13.600.000,00	
Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	0,00	2,00	13.600.000,00	2,00	13.600.000,00	2,00	13.600.000,00	2,00	13.600.000,00	2,00	13.600.000,00	
2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00	
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	1,00	1,00	180.000.000,00	1,00	180.000.000,00	1,00	180.000.000,00	1,00	180.000.000,00	1,00	180.000.000,00	
2.12.02.2.01.0003 - Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang)	0,00	1,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	
2.12.02.2.01.0005 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				46.606.000,00		46.606.000,00		46.606.000,00		46.606.000,00		46.606.000,00	
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	1,00	1,00	46.606.000,00	1,00	46.606.000,00	1,00	46.606.000,00	1,00	46.606.000,00	1,00	46.606.000,00	
2.12.02.2.01.0007 - Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				3.184.140,00		3.184.140,00		3.184.140,00		3.184.140,00		3.184.140,00	

Terlaksananya Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	1,00	1,00	3.184.140,00	1,00	3.184.140,00	1,00	3.184.140,00	1,00	3.184.140,00	1,00	3.184.140,00		
2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftaran Penduduk				27.625.000,00		27.625.000,00		27.625.000,00		27.625.000,00		27.625.000,00		
Terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	4,00	4,00	27.625.000,00	4,00	27.625.000,00	4,00	27.625.000,00	4,00	27.625.000,00	4,00	27.625.000,00		
2.12.02.2.02.0002 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan				27.625.000,00		27.625.000,00		27.625.000,00		27.625.000,00		27.625.000,00		
Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	4,00	4,00	27.625.000,00	4,00	27.625.000,00	4,00	27.625.000,00	4,00	27.625.000,00	4,00	27.625.000,00		
2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				66.100.000,00		66.100.000,00		66.100.000,00		66.100.000,00		66.100.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0,00	4,00	66.100.000,00	4,00	66.100.000,00	4,00	66.100.000,00	4,00	66.100.000,00	4,00	66.100.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk (Laporan)	0,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00			
2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				9.500.000,00		9.500.000,00		9.500.000,00		9.500.000,00		9.500.000,00		

Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0,00	4,00	9.500.000,00	4,00	9.500.000,00	4,00	9.500.000,00	4,00	9.500.000,00	4,00	9.500.000,00
2.12.02.2.03.0003 - Fasilitas Pendaftaran Penduduk				39.600.000,00		39.600.000,00		39.600.000,00		39.600.000,00		39.600.000,00
Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk (Laporan)	0,00	4,00	39.600.000,00	4,00	39.600.000,00	4,00	39.600.000,00	4,00	39.600.000,00	4,00	39.600.000,00
2.12.02.2.03.0005 - Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00
Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0,00	1,00	17.000.000,00	1,00	17.000.000,00	1,00	17.000.000,00	1,00	17.000.000,00	1,00	17.000.000,00
2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				19.000.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	0,00	4,00	19.000.000,00	4,00	19.000.000,00	4,00	19.000.000,00	4,00	19.000.000,00	4,00	19.000.000,00
	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
2.12.02.2.04.0001 - Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	0,00	4,00	5.000.000,00	4,00	5.000.000,00	4,00	5.000.000,00	4,00	5.000.000,00	4,00	5.000.000,00
2.12.02.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0,00	1,00	14.000.000,00	1,00	14.000.000,00	1,00	14.000.000,00	1,00	14.000.000,00	1,00	14.000.000,00
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				109.000.000,00		109.000.000,00		109.000.000,00		109.000.000,00		109.000.000,00

Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	1,00	1,00	109.000.000,00	1,00	109.000.000,00	1,00	109.000.000,00	1,00	109.000.000,00	1,00	109.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	4,00	4,00	15.000.000,00	4,00	15.000.000,00	4,00	15.000.000,00	4,00	15.000.000,00	4,00	15.000.000,00		
2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	4,00	4,00	15.000.000,00	4,00	15.000.000,00	4,00	15.000.000,00	4,00	15.000.000,00	4,00	15.000.000,00		
2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				94.000.000,00		94.000.000,00		94.000.000,00		94.000.000,00		94.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil (Laporan)	0,00	2,00	94.000.000,00	2,00	94.000.000,00	2,00	94.000.000,00	2,00	94.000.000,00	2,00	94.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00			

	Kabupaten/Kota (Laporan)												
	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	0,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		
	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	0,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
2.12.03.2.02.0002 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing- Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing- Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing- Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	0,00	4,00	10.000.000,00	4,00	10.000.000,00	4,00	10.000.000,00	4,00	10.000.000,00	4,00	10.000.000,00	
2.12.03.2.02.0004 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00	

Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	0,00	4,00	24.000.000,00	4,00	24.000.000,00	4,00	24.000.000,00	4,00	24.000.000,00	4,00	24.000.000,00		
2.12.03.2.02.0006 - Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil (Laporan)	0,00	2,00	40.000.000,00	2,00	40.000.000,00	2,00	40.000.000,00	2,00	40.000.000,00	2,00	40.000.000,00		
2.12.03.2.02.0008 - Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersosialisasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	0,00	1,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00		
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				398.288.550,00		314.521.900,00		371.029.400,00		324.058.000,00		391.752.000,00		
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	1,00	1,00	398.288.550,00	1,00	314.521.900,00	1,00	371.029.400,00	1,00	324.058.000,00	1,00	391.752.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				85.581.900,00		33.920.900,00		67.150.000,00		37.640.000,00		73.250.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan)	4,00	4,00	85.581.900,00	4,00	33.920.900,00	4,00	67.150.000,00	4,00	37.640.000,00	4,00	73.250.000,00		
	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	14,00	17,00		19,00		21,00		23,00		25,00			
2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan				34.002.900,00		13.992.900,00		14.500.000,00		15.250.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	12,00	12,00	34.002.900,00	12,00	13.992.900,00	12,00	14.500.000,00	12,00	15.250.000,00	12,00	20.000.000,00		
2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				36.851.000,00		15.100.000,00		37.550.000,00		16.890.000,00		38.000.000,00		
Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	14,00	17,00	36.851.000,00	19,00	15.100.000,00	21,00	37.550.000,00	23,00	16.890.000,00	25,00	38.000.000,00		

2.12.04.2.01.0003 - Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah				14.728.000,00		4.828.000,00		15.100.000,00		5.500.000,00		15.250.000,00		
Terlaksananya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan)	4,00	4,00	14.728.000,00	4,00	4.828.000,00	4,00	15.100.000,00	4,00	5.500.000,00	4,00	15.250.000,00		
2.12.04.2.02 - Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				68.656.900,00		68.700.000,00		68.760.000,00		68.880.000,00		68.950.000,00		
Terlaksananya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun (Dokumen)	1,00	2,00	68.656.900,00	2,00	68.700.000,00	2,00	68.760.000,00	2,00	68.880.000,00	2,00	68.950.000,00		
2.12.04.2.02.0001 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				68.656.900,00		68.700.000,00		68.760.000,00		68.880.000,00		68.950.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun (Dokumen)	1,00	2,00	68.656.900,00	2,00	68.700.000,00	2,00	68.760.000,00	2,00	68.880.000,00	2,00	68.950.000,00		
2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				172.419.000,00		158.573.000,00		175.260.500,00		161.790.000,00		177.104.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	0,00	1,00	172.419.000,00	1,00	158.573.000,00	1,00	175.260.500,00	1,00	161.790.000,00	1,00	177.104.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	0,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			

	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	0,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	0,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri (Dokumen)	0,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi (Dokumen)	0,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)	0,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	0,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		
2.12.04.2.03.0001 - Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				22.672.000,00		22.700.000,00		22.750.000,00		23.050.000,00		23.109.000,00	
Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	0,00	4,00	22.672.000,00	4,00	22.700.000,00	4,00	22.750.000,00	4,00	23.050.000,00	4,00	23.109.000,00	
2.12.04.2.03.0002 - Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri				20.992.000,00		21.105.000,00		22.000.500,00		22.250.000,00		22.305.000,00	

Terlaksananya Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri (Dokumen)	0,00	1,00	20.992.000,00	1,00	21.105.000,00	1,00	22.000.500,00	1,00	22.250.000,00	1,00	22.305.000,00		
2.12.04.2.03.0003 - Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				44.416.000,00		10.500.000,00		45.100.000,00		11.550.000,00		45.250.000,00		
Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	0,00	1,00	44.416.000,00	1,00	10.500.000,00	1,00	45.100.000,00	1,00	11.550.000,00	1,00	45.250.000,00		
2.12.04.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				24.337.000,00		24.550.000,00		24.600.000,00		24.650.000,00		24.700.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	0,00	1,00	24.337.000,00	1,00	24.550.000,00	1,00	24.600.000,00	1,00	24.650.000,00	1,00	24.700.000,00		
2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				24.822.000,00		24.980.000,00		24.910.000,00		25.010.000,00		25.130.000,00		
Ter sosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	0,00	1,00	24.822.000,00	1,00	24.980.000,00	1,00	24.910.000,00	1,00	25.010.000,00	1,00	25.130.000,00		
2.12.04.2.03.0008 - Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi				5.568.000,00		24.750.000,00		5.750.000,00		24.880.000,00		5.950.000,00		
Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi (Dokumen)	0,00	2,00	5.568.000,00	2,00	24.750.000,00	2,00	5.750.000,00	2,00	24.880.000,00	2,00	5.950.000,00		
2.12.04.2.03.0007 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				24.762.000,00		25.028.000,00		25.100.000,00		25.250.000,00		25.450.000,00		
Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)	0,00	1,00	24.762.000,00	1,00	25.028.000,00	1,00	25.100.000,00	1,00	25.250.000,00	1,00	25.450.000,00		
2.12.04.2.03.0008 - Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan				4.850.000,00		4.960.000,00		5.050.000,00		5.150.000,00		5.210.000,00		

Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	0,00	12,00	4.850.000,00	12,00	4.960.000,00	12,00	5.050.000,00	12,00	5.150.000,00	12,00	5.210.000,00		
2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				71.630.750,00		53.328.000,00		59.858.900,00		55.748.000,00		72.448.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)		4,00	71.630.750,00	4,00	53.328.000,00	4,00	59.858.900,00	4,00	55.748.000,00	4,00	72.448.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)		6,00		4,00		4,00		4,00		6,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan (Dokumen)		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
2.12.04.2.04.0001 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12.132.000,00		7.730.000,00		12.210.000,00		7.950.000,00		12.550.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)		4,00	12.132.000,00	4,00	7.730.000,00	4,00	12.210.000,00	4,00	7.950.000,00	4,00	12.550.000,00		

2.12.04.2.04.0002 - Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan				11.250.750,00		11.350.000,00		11.400.900,00		11.550.000,00		11.650.000,00		
Tertaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan (Dokumen)	12,00		11.250.750,00	12,00	11.350.000,00	12,00	11.400.900,00	12,00	11.550.000,00	12,00	11.650.000,00		
2.12.04.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				48.248.000,00		34.248.000,00		36.248.000,00		36.248.000,00		48.248.000,00		
Tertaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	6,00		48.248.000,00	4,00	34.248.000,00	4,00	36.248.000,00	4,00	36.248.000,00	6,00	48.248.000,00		
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				30.399.000,00		30.650.000,00		30.830.000,00		30.976.000,00		31.610.000,00		
Meningkatnya kualitas profil Pengelolaan kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependuduka (Persentase)	1,00	1,00	30.399.000,00	1,00	30.650.000,00	1,00	30.830.000,00	1,00	30.976.000,00	1,00	31.610.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan				30.399.000,00		30.650.000,00		30.830.000,00		30.976.000,00		31.610.000,00		

Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)		1,00	30.399.000,00	1,00	30.650.000,00	1,00	30.830.000,00	1,00	30.976.000,00	1,00	31.610.000,00		
	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00			
2.12.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota				4.850.000,00		5.000.000,00		5.110.000,00		5.166.000,00		5.720.000,00		
Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)		2,00	4.850.000,00	2,00	5.000.000,00	2,00	5.110.000,00	2,00	5.166.000,00	2,00	5.720.000,00		
2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain				25.549.000,00		25.650.000,00		25.720.000,00		25.810.000,00		25.890.000,00		
Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)		1,00	25.549.000,00	1,00	25.650.000,00	1,00	25.720.000,00	1,00	25.810.000,00	1,00	25.890.000,00		

Dalam rangka memastikan keterpaduan antara Renstra Perangkat Daerah dengan arah pembangunan daerah, diperlukan identifikasi subkegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pencapaian program prioritas pembangunan Kota Kotamobagu. Subkegiatan prioritas tersebut dipilih berdasarkan urgensi, relevansi terhadap isu strategis, kontribusi terhadap pencapaian sasaran RPJMD, serta keterkaitannya dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penetapan subkegiatan prioritas juga mempertimbangkan keterbatasan kapasitas fiskal daerah, sehingga fokus diarahkan pada subkegiatan yang memiliki dampak signifikan, dapat diukur hasilnya, serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daftar subkegiatan prioritas ini menjadi instrumen penghubung antara strategi jangka menengah dengan implementasi tahunan yang lebih operasional. Adapun daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Pemerintah Kota Kotamobagu

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1.	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftaran Penduduk 2.12.02.2.02.0002 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	
2.	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 2.12.03.2.02.0006 - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	

Penetapan indikator kinerja merupakan bagian penting dalam memastikan keterukuran pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan sebagai indikator terpilih yang secara langsung mencerminkan keberhasilan pencapaian tujuan strategis perangkat daerah, sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) difokuskan pada ukuran kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah.

IKU digunakan untuk menilai sejauh mana arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan mampu menghasilkan capaian strategis yang berdampak luas bagi masyarakat. Sementara itu, IKK berfungsi untuk mengukur kinerja teknis yang lebih operasional, sehingga dapat menggambarkan efektivitas penyelenggaraan layanan dasar sesuai standar NSPK yang berlaku. Dengan demikian, IKU dan IKK saling melengkapi dalam memberikan gambaran kinerja perangkat daerah secara menyeluruh.

IKU dan IKK berlaku untuk periode perencanaan 2025-2030 dengan target tahunan yang disusun secara bertahap, realistis, dan terukur. Rangkaian indikator ini menjadi dasar dalam pemantauan dan evaluasi kinerja, sekaligus sebagai instrumen akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di Kota Kotamobagu. Adapun rincian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
	Indeks Tertib Kepemilikan	%	0,00	92,55	92,56	92,57	92,58	92,59	92,60	
2.	Administrasi Kependudukan dan Tertib Pemanfaatan Data									
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	69,96	7,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
2.	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	positif	Persentase	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
3.	Cakupan Pengelolaan Profil Kependuduka	positif	Persentase	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
4.	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	positif	Persentase	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
5.	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	positif	%	1,79	1,90	2,00	2,30	2,40	2,50	3,00	
6.	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	positif	Persentase	68,10	69,22	7,00	75,00	8,00	85,00	9,00	
7.	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	positif	Persentase	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
8.	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	positif	Persentase	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
9.	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	positif	Persentase	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam menetapkan arah kebijakan, strategi, serta pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini mencerminkan komitmen Disdukcapil dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan adminduk yang berbasis digital, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Pelaksanaan Renstra ini akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan kebijakan nasional, dinamika pembangunan daerah, serta kebutuhan masyarakat. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian strategi dan langkah operasional, sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai secara efektif, efisien, serta berkesinambungan.

Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu Tahun 2025-2029 ini, diharapkan seluruh jajaran Disdukcapil dapat menjadikannya sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan administrasi kependudukan secara optimal. Kerja sama dan koordinasi yang solid dengan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar penyelenggaraan layanan adminduk dapat memberikan nilai tambah yang nyata terhadap peningkatan tertib administrasi, validitas data kependudukan, serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Kotamobagu,



ROI PAPUTUNGAN, S.E., M.A.P.
NIP. 19760714 200902 1 001